

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia ialah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik. Empat lempeng tektonik tersebut adalah lempeng-lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia serta Samudera Pasifik.¹ maka Indonesia memiliki resiko yang cukup besar dalam menghadapi bencana alam. Nampaknya bencana alam dalam sepuluh tahun terakhir ini terus melanda Indonesia. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, dll. fenomena ini menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah perubahan iklim dan perkembangan pesat populasi serta infrastruktur. Bencana alam seringkali memiliki dampak yang luas dan beragam. Kerusakan fisik adalah yang paling nyata, dengan bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang hancur atau rusak. Juga ada dampak sosial dan ekonomi, termasuk korban jiwa, pengungsi, gangguan pada pendidikan dan pekerjaan, serta kerugian ekonomi yang besar. Bencana alam juga bisa menyebabkan trauma psikologis dan mempengaruhi kesehatan mental masyarakat yang terkena dampak.

Salah satu wilayah di Indonesia yaitu Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir merupakan salah satu provinsi yang sering terjadi bencana alam. Kejadian bencana alam yang umum terjadi adalah banjir, puting beliung, dan tanah longsor.²

¹ Anies. 2018. *Manajemen Bencana Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

² Hasanah, S. H. Analisis Multidimensional Scaling Pada Bencana Alam Di Provinsi Banten Tahun 2010–2019.

Bencana alam di Indonesia mencakup beragam jenis, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Gempa bumi dan tsunami adalah dua bencana yang sering memicu kerusakan dan korban jiwa yang besar. Kedudukan Indonesia di pertemuan lempeng tektonik menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi, seperti yang terlihat dari gempa bumi Aceh 2004 dan Palu 2018 yang juga memicu tsunami.

Bencana seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terutama selama musim hujan. Penggunaan lahan yang tidak tepat dan deforestasi memperparah kondisi ini. Kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, juga menjadi bencana tahunan yang mencemari udara dan merusak ekosistem. Namun, di balik tantangan ini, ada juga peluang. Bencana alam telah memicu peningkatan kesadaran tentang pentingnya penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi telah berupaya untuk mencegah, memitigasi, dan merespon bencana alam.

Upaya ini melibatkan sejumlah strategi, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penerapan sistem peringatan dini, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta perencanaan dan regulasi penggunaan lahan yang berkelanjutan. Rehabilitasi dan konservasi lingkungan, termasuk reboisasi dan perlindungan sungai dan daerah aliran sungai, juga menjadi fokus penting.

Masyarakat Indonesia juga telah menunjukkan ketangguhan dan solidaritas yang kuat dalam menghadapi bencana, dengan membantu satu sama lain dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Kebijakan dan inisiatif lokal juga telah menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan badan terkait lainnya, berupaya mengurangi risiko dan dampak dari bencana ini melalui berbagai upaya, termasuk sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan program mitigasi bencana. Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar, mengingat keragaman dan skala bencana yang dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Provinsi Banten merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana dan Banten yang terletak di bagian barat pulau Jawa, Indonesia, telah menjadi saksi bisu dari berbagai bencana alam yang merusak, salah satunya adalah banjir. Berada di kawasan dengan curah hujan tinggi dan memiliki banyak sungai serta daerah aliran sungai (DAS), Banten memiliki kondisi geografis yang membuatnya rawan banjir, terutama saat musim hujan. Dengan peningkatan aktivitas manusia dan urbanisasi yang berjalan pesat, tantangan ini menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani.

Banjir di Banten bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, seperti merusak rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Kehidupan sehari-hari terhenti, akses ke sekolah dan tempat kerja terputus, dan penyebaran penyakit menjadi beberapa konsekuensi yang seringkali dihadapi masyarakat setelah banjir.

Penanggulangan bencana banjir di Banten membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang banjir dan bagaimana cara meresponsnya dengan baik. baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Kota Tangerang adalah salah satu kota terbesar yang ada di Provinsi Banten, Kota Tangerang mempunyai 13 kecamatan yaitu Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang Kota, Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batuceper, Neglasari, dan Benda. Selain kota yang luas, Kota Tangerang juga salah satu kota yang berada dekat dengan Ibu Kota Jakarta yang dimana Kota Tangerang menjadi salah satu kota hunian yang diminati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal.³ Lokasi geografis kota ini, yang berada di dataran rendah dan berdekatan dengan beberapa sungai besar, serta tingginya curah hujan, menjadikan Tangerang rawan terhadap bencana banjir. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat, pembangunan yang tidak terkendali, dan penurunan kualitas lingkungan telah memperparah situasi ini.

Banjir di Tangerang tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, seperti merusak rumah dan infrastruktur publik, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banjir sering kali mengganggu kegiatan sehari-hari, mempengaruhi produktivitas, dan berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit.

Tangerang menghadapi masalah serius berupa banjir yang kerap melanda kota ini, terutama pada musim hujan. Banjir membawa dampak yang sangat besar,

³ Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarok, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).

baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tangerang memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sayangnya, faktor ini, dikombinasikan dengan curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang belum optimal, seringkali menjadi pemicu terjadinya banjir. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah konversi lahan hijau menjadi lahan bangunan yang tidak memadai, baik untuk perumahan, industri, maupun komersial. Konversi lahan tersebut menyebabkan penurunan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan seringkali menimbulkan efek negatif berupa aliran permukaan yang meningkat dan berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Hasilnya, pada saat hujan deras, air tidak dapat diserap oleh tanah dan berakhir pada genangan yang mengakibatkan banjir.

Dampak dari banjir ini sangat merugikan masyarakat. Selain merusak infrastruktur seperti jalan dan bangunan, banjir juga mengakibatkan kerugian ekonomi langsung seperti kerusakan pada barang-barang dan properti. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan banyak penduduk yang terpaksa mengungsi dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Pemerintah Kota Tangerang juga perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pengendalian banjir. Edukasi tentang bahaya dan dampak banjir, serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sangat penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan peringatan dini banjir juga dapat membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri.

Banjir di Kota Tangerang adalah contoh nyata dari dampak perubahan iklim dan kurangnya perencanaan perkotaan yang baik. Solusi untuk masalah ini

memerlukan upaya yang tidak hanya bersifat reaktif, namun juga proaktif dalam merencanakan dan membangun kota yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana. Melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, kita dapat memastikan bahwa kota-kota seperti Tangerang dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus merusak lingkungan dan mengorbankan kesejahteraan penduduknya.

Semakin baik kesejahteraan penduduk dan kualitas pelayanan pada suatu kota maka akan semakin besar tingkat keinginan masyarakat untuk tinggal di kota tersebut dan ini terjadi pada kota Tangerang. Setiap tahunnya banyak perumahan baru yang dibangun begitu juga dengan penduduk Kota Tangerang yang semakin bertambah sehingga menjadi peluang untuk pelaku industri properti untuk terus membangun berbagai macam properti dan mencari setiap sudut Kota Tangerang untuk dijadikan lahan hunian. Pembangunan properti atau perumahan memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, jika pembangunan terus menerus dilakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi maka secara tidak langsung itu akan merugikan manusia.

Pembangunan perumahan yang berada di setiap sudut kota tanpa memikirkan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan bencana yang menyusahkan masyarakat misalnya bencana banjir. Hutan dan tempat resapan air yang berfungsi untuk menyerap serta menahan laju debit air hujan tidak lagi ada untuk menahan hal tersebut, bahkan saat ini dijadikan sebagai permukiman yang pada akhirnya menyebabkan bencana banjir.

Saat ini banjir yang sering sekali terjadi akibat ulah manusia sendiri dan bukan hanya sekedar membangun perumahan saja tetapi dapat terjadi karena membuang

sampah di sungai, penggundulan hutan, dan lainnya. Maka dari itu masyarakat perlu menyadari bahwa keseimbangan antara lingkungan hidup dengan pembangunan sangatlah penting untuk kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai manusia kita sudah seharusnya memikirkan segala resiko sebelum melakukan tindakan yang berada di lingkungan kita, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meminimalisir resiko yang akan terjadi pada lingkungan sekitar. Dalam menghadapi bencana banjir selain sikap dari antisipasi para masyarakat kota Tangerang untuk mencegah banjir juga sangat diperlukannya pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

Banjir ialah suatu bencana yang kerap terjadi di perkotaan dan datang secara tiba-tiba sehingga dampaknya langsung terasa pada saat itu juga. Banjir di Indonesia biasa hadir di perkotaan dan yang paling sering tersorot daerah terkena banjir adalah daerah Jabodetabek. Tangerang pun tidak luput dari perhatian mengenai banjir karena beberapa kawasan di Kota Tangerang mengalami banjir yang serupa.

Pada dasarnya, banjir terjadi ketika volume air yang masuk ke suatu area melebihi kapasitas area tersebut untuk menyerap atau mengalirkan air tersebut. Saat musim hujan, curah hujan di Tangerang dan sekitarnya bisa sangat tinggi. Jika hujan terus menerus turun dalam jangka waktu yang lama, tanah bisa menjadi jenuh dan tidak mampu menyerap lebih banyak air, menyebabkan banjir.

Kota Tangerang sudah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun infrastruktur drainase di beberapa area belum cukup memadai untuk mengatasi volume air yang besar, terutama saat hujan lebat.

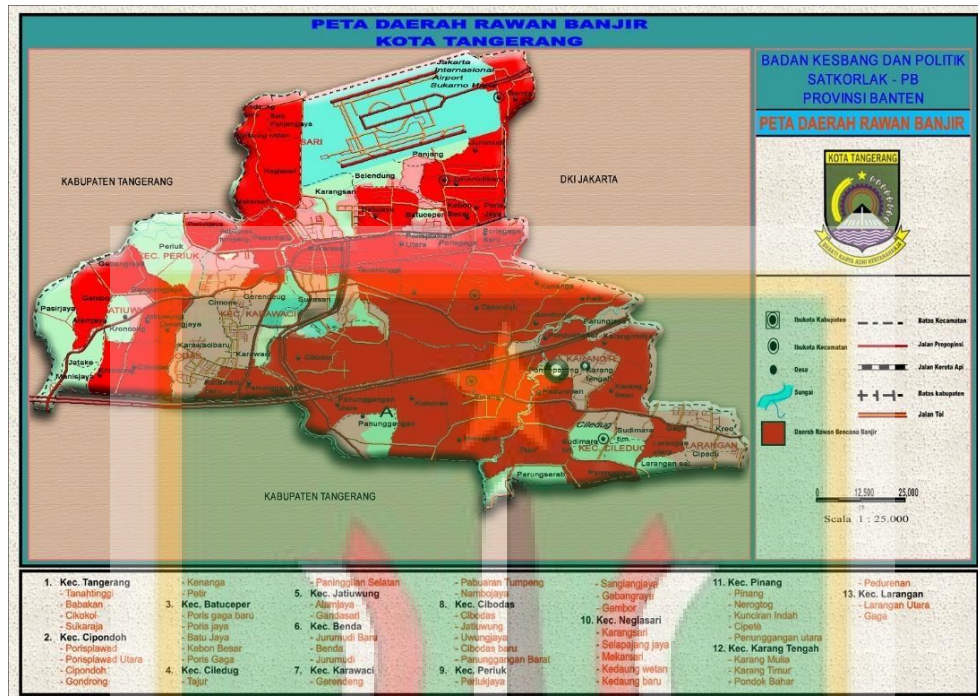
Urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali telah mengurangi ruang terbuka hijau dan lahan serapan air, seperti hutan dan rawa. Ini berarti lebih sedikit tempat bagi air hujan untuk diserap ke dalam tanah, sehingga lebih banyak air yang mengalir ke permukaan dan menyebabkan banjir.

Bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang pada awal tahun 2020 menjadi potret nyata bahwa keadaan lingkungan sedang tidak baik-baik saja. Bencana banjir yang sebelumnya hanya terjadi dalam jangka waktu lima tahun sekali kini terjadi sebanyak tiga kali dalam kurun waktu dua bulan saja, terhitung sejak Januari 2020. Faktor-faktor yang diyakini menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Tangerang adalah:

- 1) Curah hujan yang cukup ekstrim dan tinggi
- 2) Terbatasnya kapasitas volume aliran sungai Cisadane sehingga meluap
- 3) Saluran air yang tersumbat oleh sampah dan lumpur sehingga aliran air tidak lancar
- 4) Letak perumahan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang sewajarnya.⁴

⁴ Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarok, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(1).

Gambar 1.1
Data Terdampak Kejadian Bencana Banjir



Sumber: Data BPBD Banten.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pada tahun 2014 terjadi banjir di beberapa area Kota Tangerang seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Cipondoh yang berdampak pada 20.600 KK. Riwayat kejadian lain menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Januari 2020 menyebutkan telah terjadi bencana banjir di 13 Kecamatan, 42 Desa di Kota Tangerang yang berdampak pada 15.599 KK dan 3.350 jiwa, berdasarkan data BPBD Kota Tangerang yang menyebutkan bahwa

selama lima tahun terakhir (2015-2020) dari 13 kecamatan yang terdampak banjir di Kota Tangerang kejadian terparah di Wilayah Kecamatan Ciledug hampir setiap

tahun terendam banjir yang disebabkan curah hujan tinggi serta luapan kali disekitaran ciledug.⁵

Tabel 1.1 Data Banjir di Kota Tangerang

No.	Lokasi Banjir	KK	JIWA	EVAKUASI		PENGUNGS		POSKO	UPAYA YANG DILAKUKAN
	Kecamatan			KK	JIWA	KK	JIWA		
1	Cibodas	80	240	5	15			Kantor Kecamatan	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga
2	Jatiuwung	200	2734					Majelis, Posko RT.02 & RT.03	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga
3	Periuk	5480	18820	2530	7601	4816	16906	Posyandu RW.004, Masjid Nurul Janah, Sektetariat RW.005, SDN Total Persada, GOR Total Persada, Masjid Mujahidin, Posyandu RW.010	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Monitoring Pompa Banjir, Melakukan Evakuasi Warga
4	Karawaci	46	138	3	9			Balai Warga	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga
5	Benda								Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga
6	Karang Tengah			4	6			Posko Depan Alfa Midi CI 2, Pedurenan, Karang Tengah	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Membantu Mobilisasi Warga, Melakukan Evakuasi Warga
6	Karang Tengah	354	2518	2	6				Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga, Menyalurkan Bantuan Logistik
7	Cipondoh	347	5847	3	9			Mushola Durun Gola, Majlis Ta'lim Al Yakubiyah & RW.003	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Melakukan Evakuasi Warga, Menyalurkan Bantuan Logistik
8	Pinang	699	2157	1	3				Koordinasi, Melakukan Pemantauan

⁵ <https://bpbd.tangerangkota.go.id/>

9	BATUCEPER	70	210						Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Membantu Mobilisasi Warga, Melakukan Penyedotan
10	NEGLASARI	3	9						Koordinasi, Melakukan Pemantauan
11	TANGERANG	85	255					Keluar Perum TCE	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Membantu Mobilisasi Warga
13	CILEDUG	1547	6101	4	6			Masjid Hidayatul Ihwan	Koordinasi, Melakukan Pemantauan, Membantu Mobilisasi Warga

Sumber: BPBD Kota Tangerang 2021

Hujan deras yang melanda Kota Tangerang dalam periode 20 Februari hingga 25 Februari 2021 telah menyebabkan sejumlah wilayah mengalami genangan air dan banjir. Dampaknya sangat terasa bagi warga setempat, dengan banyak rumah dan jalan yang terendam air. Dalam laporan ini, kami akan memberikan gambaran detail tentang wilayah-wilayah yang terdampak banjir, jumlah kepala keluarga (KK) dan jiwa yang terkena dampak, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi situasi ini.

Wilayah Cibodas

Wilayah Cibodas menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh banjir. Sebanyak 80 KK dengan total 240 jiwa dilaporkan terkena dampaknya. Pemerintah setempat telah melakukan evakuasi untuk lima KK atau sekitar 15 jiwa. Saat ini, belum tercatat adanya pengungsi di wilayah ini. Posko yang didirikan di Kantor Kecamatan Cibodas telah melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap situasi banjir serta membantu proses evakuasi warga yang terdampak.

Wilayah Jatiuwung:

Wilayah Jatiuwung juga turut merasakan dampak banjir, dengan 200 KK atau sekitar 2734 jiwa terdampak. Meskipun demikian, belum ada laporan evakuasi atau pengungsian yang dilakukan di wilayah ini. Posko yang beroperasi di Majelis dan Posko RT.02 & RT.03 telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan banjir serta memberikan bantuan jika diperlukan.

Wilayah Periuk:

Banjir di wilayah Periuk menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan. Terdapat 5480 KK atau sekitar 18820 jiwa yang terdampak, dan 2530 KK atau sekitar 7601 jiwa telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jumlah pengungsi mencapai 4816 KK atau sekitar 16906 jiwa. Sejumlah tempat seperti Posyandu RW.004, Masjid Nurul Janah, Sekretariat RW.005, SDN Total Persada, GOR Total Persada, Masjid Mujahidin, dan Posyandu RW.010 telah berfungsi sebagai posko untuk memberikan koordinasi dan pemantauan dalam penanganan banjir. Upaya pemantauan pompa banjir dan proses evakuasi warga menjadi fokus utama dari tim di wilayah ini.

Wilayah Karawaci:

Wilayah Karawaci melaporkan adanya 46 KK atau sekitar 138 jiwa yang terkena dampak banjir. Meskipun jumlahnya tidak sebesar wilayah lain, namun pihak Balai Warga telah bergerak untuk melakukan koordinasi dan pemantauan, serta telah melakukan evakuasi terhadap tiga KK atau sekitar sembilan jiwa yang terdampak.

Wilayah Benda:

Data terkait wilayah Benda masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Namun, tim di lapangan telah berusaha melakukan koordinasi dan pemantauan serta evakuasi jika diperlukan.

Wilayah Karang Tengah:

Wilayah Karang Tengah menghadapi dua kejadian banjir dengan detail belum tercatat. Namun, upaya yang telah dilakukan berfokus pada membantu mobilisasi warga dan melakukan evakuasi. Posko di Depan Alfa Midi CI 2, Pedurenan, dan Karang Tengah terus beroperasi untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Wilayah Cipondoh:

Wilayah Cipondoh melaporkan terdapat 347 KK atau sekitar 5847 jiwa yang terdampak banjir. Proses evakuasi terhadap tiga KK atau sekitar sembilan jiwa telah dilakukan untuk mengamankan warga dari genangan air. Beberapa tempat seperti Mushola Durun Gola, Majelis Ta'lim Al Yakubiyah, dan RW.003 turut berfungsi sebagai posko untuk melakukan koordinasi, pemantauan, serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang membutuhkan.

Wilayah Pinang:

Wilayah Pinang melaporkan 699 KK atau sekitar 2157 jiwa terdampak. Saat ini, terdapat satu KK atau sekitar tiga jiwa yang telah dievakuasi. Data mengenai pengungsi di wilayah ini belum tercatat dengan jelas.

Wilayah Batuceper:

Wilayah Batuceper melaporkan adanya 70 KK atau sekitar 210 jiwa yang terkena dampak banjir. Proses evakuasi belum dilakukan pada wilayah ini, namun tim yang beroperasi telah melakukan koordinasi dan pemantauan serta membantu mobilisasi warga. Tim juga melakukan penyedotan air untuk mengurangi dampak genangan.

Wilayah Neglasari:

Wilayah Neglasari melaporkan hanya terdapat tiga KK atau sekitar sembilan jiwa yang terkena dampak banjir. Meskipun jumlahnya tidak signifikan, pihak terkait telah melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap wilayah ini.

Wilayah Tangerang:

Wilayah Tangerang melaporkan 85 KK atau sekitar 255 jiwa yang terkena dampak banjir. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai proses evakuasi atau pengungsian. Pihak yang bertanggung jawab telah melakukan koordinasi dan pemantauan serta membantu mobilisasi warga.

Wilayah Ciledug:

Wilayah Ciledug melaporkan 1547 KK atau sekitar 6101 jiwa terdampak banjir. Sebanyak empat KK atau sekitar enam jiwa telah dievakuasi. Saat ini belum terdapat pengungsi di wilayah ini. Upaya pemantauan dan bantuan dalam mobilisasi warga menjadi fokus utama dalam penanganan banjir di wilayah ini.

Banjir di Kota Tangerang telah menyebabkan berbagai wilayah mengalami genangan air dan dampak yang signifikan bagi warga. Upaya penanganan terus dilakukan oleh pihak terkait dengan koordinasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Bantuan logistik dan evakuasi juga menjadi prioritas dalam membantu warga yang terdampak. Semoga kondisi segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

Gambar 1.2
Infografis Banjir di Kota Tangerang



Sumber: Pusat Pengendalian Operasi BNPB

Pada tabel diatas ini Kota Tangerang mengalami hujan lebat dan meluapnya Sungai Sabi pada 5 April Tahun 2022, ada enam kecamatan dan 445 kk yang terdampak banjir tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah berkoordinasi dengan aparat kecamatan terkait wilayah setempat dan melakukan monitoring ke lapangan serta menurunkan tim dan unit perahu untuk antisipasi pengungsi dan mobilisasi warga pihak dinas terkait melakukan penyedotan di wilayah Panunggangan Utara, Pinang dan Komplek Bumi Mas Raya, Tangerang.

**Table 1.2 Data
Banjir Provinsi Jawa Barat**

No	Nama Provinsi	Kabupaten Kota	Jumlah Banjir	Satuan	Tahun
1	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	75	Kejadian	2021
2	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	27	Kejadian	2021
3	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	8	Kejadian	2021
4	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	50	Kejadian	2021
5	Jawa Barat	Kabupaten Garut	14	Kejadian	2021
6	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	1	Kejadian	2021
7	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	12	Kejadian	2021
8	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	4	Kejadian	2021
9	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	9	Kejadian	2021
10	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	9	Kejadian	2021
11	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	14	Kejadian	2021
12	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	10	Kejadian	2021
13	Jawa Barat	Kabupaten Subang	16	Kejadian	2021
14	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	3	Kejadian	2021
15	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	15	Kejadian	2021
16	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	9	Kejadian	2021
17	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	10	Kejadian	2021
18	Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	0	Kejadian	2021
19	Jawa Barat	Kota Bogor	18	Kejadian	2021
20	Jawa Barat	Kota Sukabumi	2	Kejadian	2021
21	Jawa Barat	Kota Bandung	2	Kejadian	2021
22	Jawa Barat	Kota Cirebon	1	Kejadian	2021
23	Jawa Barat	Kota Bekasi	14	Kejadian	2021
24	Jawa Barat	Kota Depok	3	Kejadian	2021

25	Jawa Barat	Kota Cimahi	6	Kejadian	2021
26	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	2	Kejadian	2021
27	Jawa Barat	Kota Banjar	1	Kejadian	2021
28	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	28	Kejadian	2022
29	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	30	Kejadian	2022
30	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	12	Kejadian	2022
31	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	25	Kejadian	2022
32	Jawa Barat	Kabupaten Garut	12	Kejadian	2022
33	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	4	Kejadian	2022
34	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	8	Kejadian	2022
35	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	6	Kejadian	2022
36	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	13	Kejadian	2022
37	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	6	Kejadian	2022
38	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	10	Kejadian	2022
39	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	1	Kejadian	2022
40	Jawa Barat	Kabupaten Subang	7	Kejadian	2022
41	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	4	Kejadian	2022
42	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	17	Kejadian	2022
43	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	7	Kejadian	2022
44	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	5	Kejadian	2022
45	Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	5	Kejadian	2022
46	Jawa Barat	Kota Bogor	10	Kejadian	2022
47	Jawa Barat	Kota Sukabumi	5	Kejadian	2022
48	Jawa Barat	Kota Bandung	2	Kejadian	2022
49	Jawa Barat	Kota Cirebon	9	Kejadian	2022
50	Jawa Barat	Kota Bekasi	7	Kejadian	2022
51	Jawa Barat	Kota Depok	6	Kejadian	2022

52	Jawa Barat	Kota Cimahi	10	Kejadian	2022
53	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	2	Kejadian	2022
54	Jawa Barat	Kota Banjar	0	Kejadian	2022

Sumber: Open Data Jawa Barat

Tabel Diatas Merupakan Data Bencana Banjir Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam upaya melaksanakan tugasnya, BPBD terdiri dari berbagai unit kerja yang berperan penting dalam mengelola dan menanggulangi bencana, yaitu:

1. Unit Perencanaan dan Pencegahan

Unit ini bertanggung jawab dalam merumuskan rencana penanggulangan bencana, mengidentifikasi daerah rawan bencana, dan melakukan pemetaan risiko. Mereka mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi terkait potensi bencana di daerah tersebut. Unit ini juga berperan dalam mengembangkan program pencegahan bencana, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan, dan implementasi tindakan mitigasi risiko;

2. Unit Operasi dan Tanggap Darurat

Unit ini bertugas menjalankan operasi dan merespons bencana secara cepat dan efektif. Mereka mengkoordinasikan upaya evakuasi, penyelamatan, dan pertolongan pertama pada korban bencana. Unit ini juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, TNI, dan tim medis, untuk memberikan respons darurat yang terkoordinasi dan membantu masyarakat terdampak;

3. Unit Logistik dan Peralatan

Unit ini bertanggung jawab dalam mengelola logistik dan peralatan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Mereka mengkoordinasikan pengadaan dan distribusi sumber daya seperti makanan, air bersih, tenda, peralatan medis, perahu karet, dan peralatan penyelamatan lainnya. Unit ini juga memastikan tersedianya peralatan pemantauan, komunikasi, dan transportasi yang diperlukan selama operasi tanggap darurat;

4. Unit Informasi dan Komunikasi

Unit ini berperan penting dalam mengelola informasi dan komunikasi terkait bencana. Mereka mengoperasikan sistem pemantauan bencana, memantau kondisi cuaca, tinggi permukaan air sungai, dan informasi terkini mengenai bencana. Unit ini juga bertugas menyebarkan peringatan dini dan informasi kepada masyarakat terkait bahaya, evakuasi, dan langkah-langkah yang harus diambil selama bencana. Selain itu, unit ini juga mengelola saluran komunikasi dengan media, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah terkait penanggulangan bencana;

5. Unit Pemulihan dan Rekonstruksi

Setelah bencana berlalu, unit ini bertanggung jawab dalam kegiatan pemulihan dan rekonstruksi. Mereka melakukan penilaian kerusakan, merencanakan dan melaksanakan program pemulihan infrastruktur, pendukung sosial, dan ekonomi. Unit ini juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membantu masyarakat terdampak dalam membangun kembali kehidupan mereka.⁶

⁶ <https://bpbd.tangerangkota.go.id/>

Koordinasi antar BPBD dari berbagai daerah menjadi penting, terutama dalam menghadapi bencana skala besar yang melibatkan lebih dari satu daerah atau provinsi. Pertama-tama, koordinasi antar BPBD biasanya dilakukan melalui pertemuan atau rapat koordinasi yang rutin. Rapat ini bisa berbentuk pertemuan tatap muka atau melalui teknologi komunikasi modern seperti video konferensi. Dalam rapat ini, setiap BPBD dapat menyampaikan laporan tentang kondisi terkini di daerah mereka, termasuk potensi ancaman bencana dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Dengan begitu, setiap BPBD dapat saling belajar satu sama lain dan mengadaptasi strategi yang berhasil diterapkan di daerah lain.

Dalam situasi darurat atau ketika bencana terjadi, koordinasi antar BPBD menjadi sangat penting. BPBD yang berada di daerah terdampak bencana harus berkoordinasi dengan BPBD di daerah lain untuk meminta bantuan, baik berupa sumber daya manusia, material, atau peralatan. Sementara itu, BPBD di daerah lain harus berkoordinasi dengan BPBD daerah terdampak untuk mengetahui kebutuhan apa yang paling mendesak dan bagaimana cara terbaik memberikan bantuan.

Koordinasi juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan pelatihan. BPBD dari berbagai daerah dapat mengadakan pelatihan bersama atau berbagi informasi tentang metode dan teknik penanggulangan bencana yang terbaru. Dalam konteks ini, koordinasi antar BPBD tidak hanya memperkuat kemampuan penanggulangan bencana di setiap daerah, tetapi juga membangun jaringan solidaritas dan kerjasama antar daerah.

Koordinasi antar BPBD juga dilakukan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam proses perumusan standar operasional

prosedur (SOP) atau kebijakan terkait penanggulangan bencana, BPBD dari berbagai daerah perlu berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di semua daerah dan dalam berbagai situasi bencana. Singkatnya, koordinasi antar BPBD adalah elemen penting dalam manajemen penanggulangan bencana di Indonesia. Melalui koordinasi yang baik, penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dan dampak bencana dapat diminimalkan.

Menurut Peraturan Presiden Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.⁷ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim hujan dan juga terus melakukan sosialisasi kepada warga, Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang juga melakukan berbagai upaya mengantisipasi musim hujan. Salah satunya dengan membina masyarakat membuat lubang biopori berukuran besar untuk konservasi air saat hujan datang maka air yang datang tidak menggenang dan tidak berpotensi menimbulkan banjir.

Dari Peraturan Daerah Povinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga mejelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan

⁷ Bencana, B. N. P. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

bencana, dengan kewenangan menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana serta mengatur, merumuskan, dan mengawasi penanggulangan bencana. Ketentuan ini juga menjelaskan bahwa hak masyarakat atas pelatihan penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandiriannya dalam penanggulangan bencana.⁸ Selain itu, masyarakat dituntut untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, memelihara keseimbangan, keserasian, keserasian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

Dalam UU Nomor 24 tahun 2007 pasal 27 menyebutkan bahwa tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Hal ini juga dipertegas dengan Perka No. 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BPBD bahwa salah satu tugas pokok bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah mengkoordinasikan, mengomandoi, dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan kedaruratan bencana, penanganan pengungsi, dan logistik.⁹ Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dengan instansi terkait diatur dengan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peraturan ini menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

⁸ Wulung, S. R. P., & Abdullah, C. U. (2021). Program Kesiapsiagaan Tsunami Usaha Hotel di Kawasan Pariwisata Anyer, Provinsi Banten. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 117-129.

⁹ <https://bnpb.go.id/>

berkoordinasi secara horizontal dengan instansi pemerintah pada tahap pra-bencana dan pascabencana. Selain itu, Peraturan Perencanaan Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB pada Nomor 4 tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi yang saling terkait di beberapa sektor, yaitu sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan migrasi, keuangan hutan, lingkungan hidup, TNI dan kepolisian.

Dalam hal ini pencegahan banjir juga memerlukan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat agar bencana banjir tidak terjadi lagi. Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan bencana banjir adalah

kesatuan wilayah atau Daerah Aliran Sungai (DAS).¹⁰ DAS (daerah aliran sungai) adalah suatu wilayah yang menjadi titik rawan banjir dimana air hujan yang jatuh akan menuju di satu titik baik itu sungai, danau atau laut. Dalam hal ini upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengelolaan wilayah tersebut DAS (daerah aliran sungai) adalah:

- 1) Pengelolaan dan konservasi lahan pertanian;
- 2) Pembuatan dan perbaikan saluran air;
- 3) Pemeliharaan tebing atau batasan sungai;

¹⁰ Naszirudin, M. M. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng. Otoritas, 157-173.

- 4) Pengembangan infrastruktur yang sesuai untuk pencegahan banjir, misalnya pembangunan sarana irigasi.¹¹

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang umumnya diterapkan BPBD dalam penanggulangan bencana meliputi:

1. Identifikasi dan Kajian Risiko: Langkah pertama adalah identifikasi dan kajian risiko. Proses ini melibatkan analisis potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut, termasuk jenis bencana, frekuensi, dan intensitasnya.
2. Perencanaan Mitigasi: Setelah risiko diidentifikasi dan dikaji, BPBD akan merencanakan upaya mitigasi untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana. Mitigasi ini dapat berupa upaya pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, atau peningkatan kapasitas respon cepat.
3. Kesiapsiagaan: Ini melibatkan perencanaan dan persiapan untuk respon cepat terhadap bencana. Ini dapat mencakup pelatihan dan latihan, pengadaan peralatan dan perlengkapan darurat, serta pembentukan tim respon cepat.
4. Respon dan Pemulihan: Ketika bencana terjadi, BPBD bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan respon darurat. Ini melibatkan upaya pencarian dan penyelamatan, pemberian bantuan dan pelayanan medis, serta pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana.

¹¹ *Ibid*

5. Evaluasi dan Penyempurnaan: Setelah aksi respon dan pemulihan selesai, BPBD akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Ini adalah proses analisis dan peninjauan tentang bagaimana respon bencana dilakukan, apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan bagaimana proses dan protokol dapat ditingkatkan untuk masa depan.

Setiap SOP diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau regulasi lainnya yang relevan dengan penanggulangan bencana.

Koordinasi menurut Hasibuan ialah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan para anggota dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi Hasibuan lebih mengarah pada suatu proses penyatuan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Hasibuan mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan;
2. Komunikasi;
3. Pembagian Kerja;
4. Disiplin.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

¹² Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(2), 28-38.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan media pembelajaran dan penerapan pembelajaran secara lebih lanjut, serta dapat menjadikannya sebuah nilai tambah dalam pengetahuan ilmiah di bidang Pendidikan.

- Manfaat praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi proposal penelitian yang berkualitas sehingga mampu membantu peneliti mendapatkan nilai yang memuaskan. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi serta bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pembahasan

Pada BAB ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori strategi, definisi dari setiap teori yang akan diteliti, dan berisi kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada BAB ini berisi tentang pendekatan penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, Teknik analisis data, serta jadwal dan lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB ini berisi tentang dijabarkan gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta sejarahnya dan hasil dari analisis mengenai Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada BAB ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada BPBD Kota Tangerang dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.